



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.


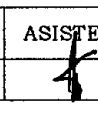
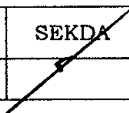
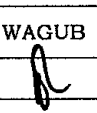
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

8. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.



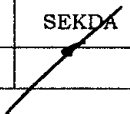

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III
ANALISIS JABATAN
Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Sekretariat Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB IV
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.



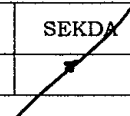
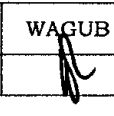
BAB V
KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			


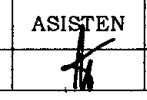
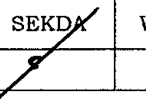
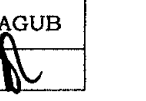
- n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
 - (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

**BAB VI
KEWENANGAN
Pasal 7**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

**BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 8**

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2018

GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH

A. BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra	1					
2	Kepala Bagian Pemerintahan Dan Administrasi Wilayah		1				
3	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan			1			
4	Pengelola Data Administrasi Kecamatan				1		
5	Pengelola Data Administrasi Desa dan Kelurahan				2		
6	Kepala Sub bagian Administrasi Wilayah Dekonsentrasi dan TP			1			
7	Pengelola Batas Wilayah				1		
8	Kepala sub bagian Tata Usaha			1			
9	Bendahara				1		
10	Pengadministrasi Keuangan				0		
11	Pengadministrasi Kepegawaian				1		
12	Pengelola Surat				1		
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				4		
14	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
15	Pengemudi				0		
16	Kepala Bagian Otonomi Daerah		1				
17	Kepala Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD			1			
18	Pengelola Data				1		
19	Kepala sub bagian Hubungan Antar Lembaga dan Penataan Daerah			1			
20	pengelola Hubungan Antar Lembaga dan Penataan daerah				1		

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Kepala sub bagian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah			1			
22	Pengelola LPPD				3		
23	kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		1				
24	Kepala Sub Bagian Keagamaan			1			
25	Analisis Lembaga Keagamaan				1		
26	Analisis Budaya Keagamaan				1		
27	Pengelola Hari-hari Besar Keagamaan				1		
28	Kepala Sub Bagian Adat dan Budaya			1			
29	Analisis Upacara Adat				1		
30	Analisis Nilai Budaya				1		
31	Pengelola Adat dan Kesenian				1		
32	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial			1			
33	Analisis Kesejahteraan Rakyat				1		
34	Analisis Masalah Sosial				1		
35	Pengelola Kesejahteraan Sosial				1		
	JUMLAH	1	3	9	27	0	
	TOTAL			40			

GUBERNUR GORONTALO

 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH

B. BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	1					
2	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan		1				
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			1			
4	Analisis Produk Hukum				3		
5	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan Pengkajian Produk Hukum			1			
6	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum				2		
7	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum			1			
8	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum				1		
9	Kepala Bagian Bantuan Hukum		1				
10	Kepala sub Bagian Litigasi dan Non Litigasi			1			
11	Analisis Berkas Sengketa				1		
12	Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM dan Pembinaan PPNS			1			
13	Analisis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia				1		
14	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Tata Usaha			1			
15	Analisis Kerjasama				1		
16	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
	Pengadministrasian Persuratan				1		
	Pengadministrasian Kepegawaian				2		
21	Pengemudi				1		
22	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1		

dm KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Bendahara				1		
24	Pengadministrasi Keuangan				1		
25	Kepala Bagian Organisasi	1	1				
26	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1			
27	Analisis Kelembagaan				1		
28	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja			1			
29	Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja				1		
30	Kepala Sub Bagian Tata Laksana			1			
31	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				1		
	JUMLAH	1	3	9	21		
	TOTAL	34					


 GUBERNUR GORONTALO
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 240 TAHUN 2018




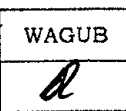
TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

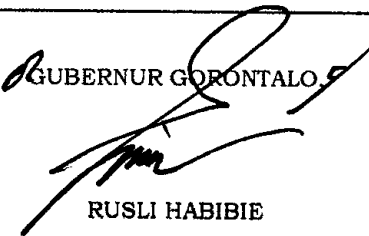
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH

C. BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi	1					
2	Kepala Bagian Administrasi Biro		1				
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
4	Pengelola Kepegawaian				1		
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
6	Bendaharawa				1		
7	Sekretaris Pimpinan				1		
8	Pengemudi				1		
9	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan SDM			1			
10	Analisis Pengembangan SDM Aparatur				1		
11	Kepala Sub Bagian Program			1			
12	Analisis Perencanaan Program				1		
13	Analisis Perencanaan Anggaran				1		
14	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan		1				
15	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD			1			
16	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dana APBD				1		
17	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan			1			
18	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dana APBN dan Tugas Pembantuan				1		
19	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD dan Tugas Pembantuan Lintas Kabupaten Kota			1			
20	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dana APBD dan Tugas Pembantuan lintas Kab/Kota				1		

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Kepala Bagian Pengendalian Ekonomi		1				
22	Kepala Sub Bagian Sarana Ekonomi			1			
23	Pengelola Data Sarana Ekonomi				1		
24	Kepala Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam			1			
25	Pengelola Data Informasi Produksi Daerah dan SDM				1		
26	Kepala Sub Bagian Industri Perdagangan dan Jasa			1			
27	Pengelola Data Industri Perdagangan dan Jasa				1		
	JUMLAH	1	3	9	14	0	
	TOTAL			27			


 GUBERNUR GORONTALO
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 48 TAHUN 2018



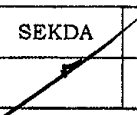
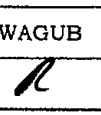
TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH

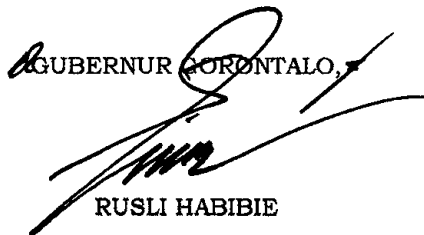
D. BIRO PENGADAAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Pengadaan	1					
2	Kepala Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi		1				
3	Kepala Sub Bagian Pendampingan dan Penerapan Regulasi			1			
4	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum				2		
5	Kepala Sub Bagian Kebijakan Teknis dan Pengembangan			1			
6	Penelaah Kebijakan barang Jasa				2		
7	Kepala Sub Bagian Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Penyebar Luasan Informasi			1			
8	Pengadministrasi LPSE				2		
9	Pengelola LPSE				2		
10	Kepala Bagian layanan Pengadaan Barang/Jasa		1				
11	Kepala Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			1			
12	Pranata Barang dan Jasa				3		
13	Pengelola ULP				6		
14	Kepala Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi			1			
15	Pranata Barang dan jasa				3		
16	Pengelola ULP				4		
17	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Lainnya			1			
18	Pranata barang dan Jasa				3		
19	Pengelola ULP				5		

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET	
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
20	Kepala Bagian Administrasi Biro		1					
21	Kepala Sub Bagian Program			1				
22	Analisis Perencanaan Program				3			
23	Kepala Sub Bagian Kepegawaian			1				
24	Pengadministrasi Kepegawaian				3			
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1				
26	Bendahara Pengeluaran				1			
27	Pengelola Barang Inventaris Milik Daerah				2			
28	Pengemudi				2			
29	Sekretaris Pimpinan				2			
30	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama					21		
31	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Muda					3		
32	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Madya					1		
	JUMLAH	1	3	9	45	25		
	TOTAL	83						

GUBERNUR KORONTALO



RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH

E. BIRO UMUM

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Umum	1					
2	Kepala Bagian Administrasi		1				
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah			1			
4	Pengadministrasi Kepegawaian				3		
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan			1			
6	Sekretaris Pimpinan				25		
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro			1			
8	Pengadministrasi Persuratan				11		
9	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		1				
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan			1			
11	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran				2		
12	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program				2		
13	Kepala Sub Bagian Verifikasi			1			
14	Verifikator Keuangan				4		
15	Kepala Sub Bagian Akuntansi			1			
16	bendahara				4		
17	Pengadministrasi Keuangan				4		
18	Kepala Bagian Pelayanan dan Perlengkapan		1				
19	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga			1			
20	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas				6		
21	Pengemudi				3		

dm KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah			1			
23	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				7		
24	Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang			1			
25	Penyusun Kebutuhan barang inventaris				4		
26	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang				3		
	JUMLAH	1	3	9	78	0	
	TOTAL			91			

GUBERNUR GORONTALO,

 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 40 TAHUN 2018





TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH

F. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Humas dan Protokol	1					
2	Kepala Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media		1				
3	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data			1			
4	Analisis Perencanaan				1		
5	Kepala Sub Bagian Kerjasama Media			1			
6	Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media				1		
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro			1			
8	Sekretaris				2		
9	Bendahara				1		
10	Pengelola Keuangan				3		
11	Pengadministrasian Kepegawaian				0		
12	Pengelola Surat				0		
13	Pengelola Barang				0		
14	Kepala Bagian Protokol		1				
15	Kepala Sub Bagian Tata Acara			1			
16	Petugas Protokol				1		
17	Kepala sub Bagian Pelayanan Tamu			1			
18	Analisis Pelayanan				5		
19	Kepala sub Bagian Agenda Kegiatan Pimpinan			1			
20	Pranata Acara				0		
21	Kepala Bagian Humas		1				

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Publikasi			1			
21	Tenaga Peliputan				3		
22	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Informasi Publik			1			
23	Pengelola Dokumentasi				5		
24	Kepala Sub Bagian Penyiaran dan Penjaringan Informasi			1			
25	Analisis Sistem Informasi				2		
26	Penerjemah					1	
	JUMLAH	1	3	9	24	1	
	TOTAL			38			


 GUBERNUR GORONTALO,
 RUSLI HABIBIE